



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## MISI KEMANUSIAAN INDONESIA PASCA-GEMPA TURKI

**Sita Hidriyah**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[sita.hidriyah@dpr.go.id](mailto:sita.hidriyah@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Bencana gempa bumi berkekuatan 7,8 menimpa wilayah Turki dan Suriah pada 6 Februari 2023. Gempa berkekuatan besar tersebut telah menewaskan lebih dari 28.000 orang serta meratakan bangunan di wilayah yang terdampak. Pusat gempa yang berada di Kahramanmaras terjadi karena gerakan yang berlokasi pada tiga lempeng aktif bumi yaitu lempeng Anatolia, Arab, dan Afrika. Total kerugian ekonomi akibat gempa diprediksi sekitar Rp60,4 triliun.

Di sisi lain atas terjadinya gempa, lambannya upaya penyelamatan oleh tim evakuasi telah memicu kemarahan warga. Presiden Turki, Erdogan yang berkunjung ke wilayah yang terdampak gempa pada 8 Februari 2023 mendapat protes dari masyarakat. Atas bencana yang terjadi, hal yang disayangkan oleh penduduk yang terdampak adalah lambatnya respons Pemerintah dalam upaya penyelamatan dan bantuan, sehingga banyak penduduk di zona bencana yang masih tidur di mobil mereka atau di jalanan dengan selimut, dikarenakan ketakutan untuk kembali ke rumah maupun gedung-gedung tempat mereka tinggal. Dalam situasi yang sulit saat ini, Erdogan tampaknya perlu membenahi dan menyeleksi mana yang menjadi prioritas, mengingat respons dirinya saat ini akan dikaitkan dengan pemilihan presiden pada 14 Mei mendatang. Bencana gempa ini dapat saja memunculkan konsekuensi besar bagi perekonomian dan perpolitikan negara Turki.

Atas terjadinya gempa yang melanda Turki dan Suriah, Ketua DPR RI telah menyampaikan duka cita serta menghimbau Pemerintah Republik Indonesia untuk mengirimkan bantuan kepada para korban. Mengenai adanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Ankara melaporkan terdapat dua WNI yang tewas karena tertimbun reruntuhan di Kahramanmaras. Korban merupakan seorang ibu dan anaknya yang berusia satu tahun. Penyelamatan tersebut telah menjadi bagian dari tugas Kemlu untuk dapat menunjukkan perannya dalam melindungi WNI yang berada di negara lain sehingga perlu didorong terus oleh DPR.

Gelombang pertama misi kemanusiaan Pemerintah Indonesia untuk penanganan pascagempa di Turki, tiba di Bandara Adana Turki, 12 Februari 2023. Misi tersebut dibawa dengan 2 pesawat TNI AU yang tiba pada dua waktu yang berbeda. Gelombang pertama misi kemanusiaan Indonesia untuk penanganan gempa di Turki ini akan disusul Gelombang Kedua pada tanggal 14 Februari 2023 dan Gelombang Ketiga pada tanggal 19 Februari 2023.

Tim Kemanusiaan Indonesia yang tiba di Turki tentunya memiliki tujuan yang mulia. Siapnya para personel dalam menjalankan misinya, dikarenakan tim tersebut masih memiliki peluang untuk menyelamatkan lebih banyak lagi korban selamat sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat. Selain itu, masyarakat setempat belum dapat membedakan

antar-bagian personel antara pencari korban dan pemberi bantuan. Oleh karenanya, dalam menyikapi hal tersebut, pihak kedutaan besar selaku wakil Pemerintah disana telah menyiapkan bantuan logistik untuk mengantisipasi harapan masyarakat sehingga komposisi personel dapat bekerja sesuai kemampuan dan porsinya. Tumpang tindih kebutuhan akan tim SAR dan logistik seperti menjadi dilema dalam penanganan bencana gempa seperti yang terjadi kali ini. Walaupun hal ini tidak dapat dihindari, misi kemanusiaan Indonesia patut diapresiasi atas peran dan kontribusinya dalam membantu korban bencana alam dengan mengirimkan personel maupun bantuan logistik yang diperlukan.

## Atensi DPR

Bencana gempa bumi berkekuatan 7,8 yang menimpa wilayah Turki dan Suriah pada 6 Februari 2023, yang menimbulkan korban jiwa begitu besar, menjadi keprihatinan internasional. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia memiliki kewajiban memberikan bantuan dan mengirimkan misi kemanusiaan ke negara yang tertimpa gempa tersebut, terlebih banyak juga WNI yang bermukim di sana. DPR RI, melalui Komisi I, perlu mengingatkan Pemerintah (khususnya Kementerian Luar Negeri) untuk berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, agar terus memantau penanganan pascagempa dan melakukan segala upaya untuk berkontribusi dalam membantu Pemerintah Turki, dan juga pihak Suriah, dalam penanganan pascagempa. Secara khusus, Komisi I perlu meminta Pemerintah RI untuk memastikan upaya-upaya penyelamatan dan bantuan terhadap WNI yang menjadi korban serta yang mengalami kerusakan rumah. Komisi I juga perlu mengingatkan Pemerintah, khususnya Kemenlu, untuk melakukan evakuasi terhadap WNI yang membutuhkan bantuan dan memastikan tempat penampungan sementara dan tersedianya kebutuhan dasar selama di penampungan.

## Sumber

cnbcindonesia.com., 7 Februari 2023;  
dpr.go.id., 9 Februari 2023;  
kemenkopmk.go.id., 11 Februari 2023;  
kemlu.go.id., 13 Februari 2023;  
*Kompas*, 9 Februari 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyantri  
Dewi Wuryandani

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023